

*disampaikan pada Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019-2020*



# Hasil Evaluasi Pelaksanaan SPM bidang Kesehatan tahun 2019 - 2021

**Rizqi Yuwanita Habibah, S.T., M.T.**

Direktorat Pembangunan Daerah  
Kedeputian Bidang Pengembangan Regional  
Kementerian PPN / Bappenas

Jakarta, 30 September 2021

# Kerangka Pembahasan

Hasil Evaluasi Pelaksanaan SPM bidang Kesehatan  
tahun 2019 - 2021



## ARAH KEBIJAKAN

1

Arah Kebijakan Percepatan  
Pelaksanaan SPM dalam RPJMN  
2020 – 2024 dan RKP 2022

## HASIL EVALUASI

2

Hasil Evaluasi Penerapan  
SPM bidang Kesehatan tahun  
2019 - 2021

# Tema, Pengarusutamaan, dan Prioritas RPJMN 2020-2024

Tema RPJMN 2020 – 2024:

Indonesia  
Berpenghasilan  
Menengah-Tinggi  
yang Sejahtera,  
Adil, dan  
Berkesinambungan

## Pengarusutamaan RPJMN 2020 – 2024:



Kesetaraan  
Gender



Tata Kelola  
(Governance)



Pembangunan  
Transformasi Digital



Pembangunan  
Berkelanjutan



Modal Sosial  
Budaya

## Prioritas RPJMN 2020 – 2024:



1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk  
Pertumbuhan yang Berkualitas



2. Mengembangkan Wilayah untuk  
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin  
Pemerataan



3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan  
Berdaya Saing



4. Revolusi Mental dan Pembangunan  
Kebudayaan



5. Memperkuat Infrastruktur  
Mendukung Pengembangan  
Ekonomi dan Pelayanan Dasar



6. Membangun Lingkungan Hidup,  
Meningkatkan Ketahanan  
Bencana dan Perubahan Iklim



7. Memperkuat Stabilitas  
Polhukhankam dan Transformasi  
Pelayanan Publik

# SPM dalam Indikator dan Target Kegiatan Prioritas RPJMN 2020 - 2024



## Kegiatan Prioritas:

- 1 Pengembangan Sektor Unggulan
- 2 Pengembangan Kawasan Strategis
- 3 Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, dan Perdesaan
- 4 Pengembangan Kawasan Strategis
- 5 Kelembagaan dan Keuangan Daerah

## Indikator dan Arah Kebijakan KP #5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah

Kebijakan Strategi	Indikator	Baseline 2019	Target RPJMN 2020-2024
<b>Persentase pencapaian SPM di daerah</b>		N/A*	100%
Integrasi dan penerapan SPM	Jumlah daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM	N/A	542 daerah
Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Jumlah daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	N/A	542 daerah
Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	N/A	4.875 aparatur

\*) Data capaian SPM berdasarkan PP No. 2/2018 belum tersedia, adapun data yang tersedia adalah capaian SPM berdasarkan PP No. 65/2005 yaitu sebesar 52%

## Target Persentase Capaian Penerapan SPM

Indikator	Baseline 2019	Target
Persentase capaian SPM bidang Pendidikan	N/A	100%
Persentase capaian SPM bidang Kesehatan	N/A	100%
Persentase capaian SPM bidang Pekerjaan Umum	N/A	100%
Persentase capaian SPM bidang Perumahan Rakyat	N/A	100%
Persentase capaian SPM bidang Sosial	N/A	100%
Persentase capaian SPM bidang Trantibumlinmas	N/A	100%

# Jenis Layanan dan Indikator Target Capaian SPM Bidang Kesehatan

## Jenis layanan provinsi

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi

## Jenis layanan kabupaten/kota

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)

INDIKATOR MATRIKS RPJMN 2020-2024	INDIKASI TARGET	
	2021	2024
Angka Kematian Ibu (per 100ribu KH)	217	183
Angka kematian bayi per 1000 KH	19,5	16
Prevalensi stunting balita (%)	21,1	14 %
Prevalensi wasting balita (%)	7,8	7 %
Prevalensi pemakaian kontrasepsi cara modern (mCPR) %	62,2	63,4 %
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,3	7,4 %
ASFR 15-19 tahun (%)	24	18 %
Insidensi TB (per 100ribu penduduk)	252	190
Insidensi HIV	0,21	0,18
Eliminasi malaria (Kab/kota)	345	405
Persentase Merokok usia 10-18 tahun (%)	9,0	8,7 %
Prevalensi Obesitas usia > 18 tahun (%)	21,8	21,8 %

## Penerima Layanan Dasar

- Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
- Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi
- Ibu hamil
- Ibu bersalin
- Bayi baru lahir
- Balita
- Usia pendidikan dasar
- Usia produktif
- Usia lanjut ;
- Penderita hipertensi
- Penderita diabetes melitus
- Orang dengan gangguan jiwa berat
- Orang terduga tuberkulosis
- Orang dengan risiko terinfeksi HIV

# Tema dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2022 (Perpres 85/2021)

## Tema RKP 2022

### “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”

#### PRIORITAS NASIONAL



Disampaikan pada Raker Banggar DPR RI, 25 Agustus 2021  
\*Keterangan: Target dalam nota keuangan 2022. Hasil kesepakatan Badan Anggaran DPR RI dan Pemerintah adalah 5,2-5,8%

**Indikator lainnya:**

- Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) 102-104
- Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) 102-105



# Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah dalam PN 2 Tahun 2022

## Pengembangan Wilayah Tahun 2022

1. Mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19,
2. Melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah,
3. Mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan
4. Meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

## Strategi Pengembangan Wilayah

- > Strategi pertumbuhan dengan mendorong pengembangan kawasan strategis seperti KEK, KI, KSPN, destinasi pariwisata, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan prioritas nasional, dan kawasan transmigrasi;
- > Strategi pemerataan dengan mempercepat penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, dan Kawasan rawan bencana.

Indikator	Target 2021	Target 2022	Target RPJMN 2024
Persentase capaian SPM di daerah (persen)	74,28%	82,85%	100%

## Kerangka PN 2

### “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan”



## KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah

- a. Peningkatan kualitas tata kelola pelayanan dasar di daerah yang lebih efektif dan efisien.
- b. Peningkatan daya saing dan kemandirian daerah melalui pengembangan kerja sama daerah, pengembangan sumber pembiayaan alternatif serta investasi di daerah.
- c. Penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah dalam mendukung kemudahan berusaha dan pemulihan ekonomi di daerah dampak pandemi Covid-19.
- d. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung transformasi digital.
- e. Penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis melalui penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP).
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan TKDD sebagai salah satu sumber pembiayaan penanganan untuk pemantapan pertumbuhan ekonomi, sistem kesehatan untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan stimulus pemulihan (recovery) ekonomi di daerah pasca dampak pandemi Covid-19.

# Kerangka Pembahasan

Hasil Evaluasi Pelaksanaan SPM bidang Kesehatan  
tahun 2019 - 2021



## ARAH KEBIJAKAN

1

Arah Kebijakan Percepatan  
Pelaksanaan SPM dalam RPJMN  
2020 – 2024 dan RKP 2022

## HASIL EVALUASI

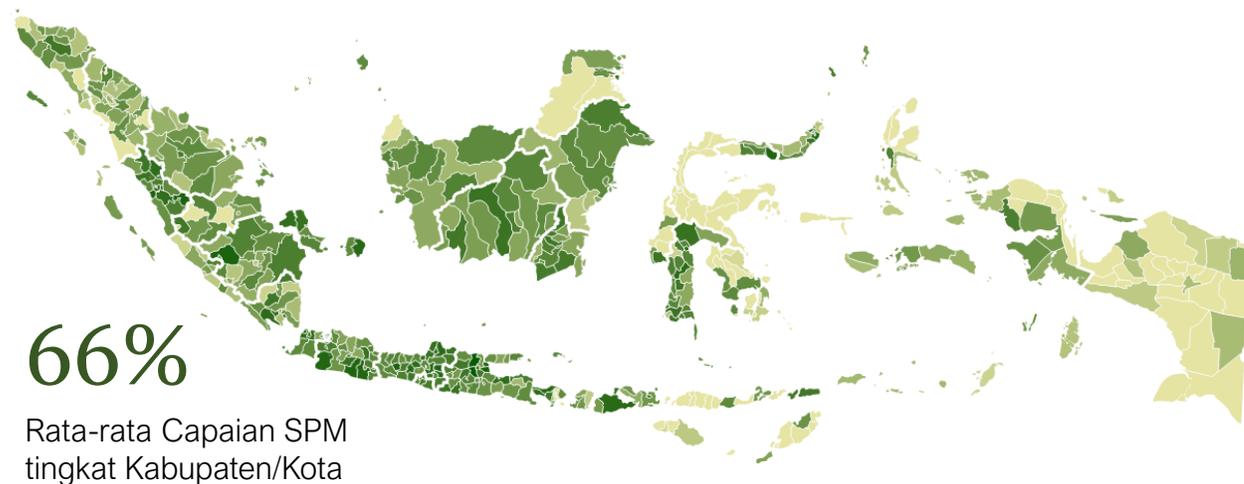
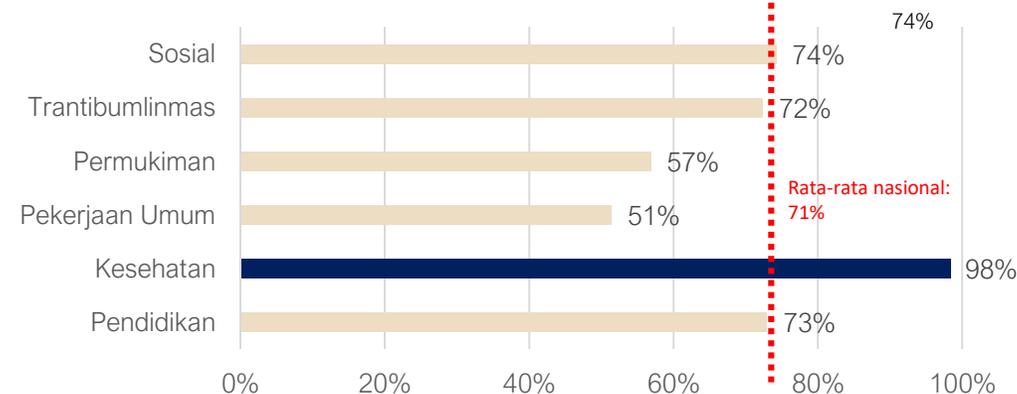
2

Hasil Evaluasi Penerapan  
SPM bidang Kesehatan tahun  
2019 - 2021

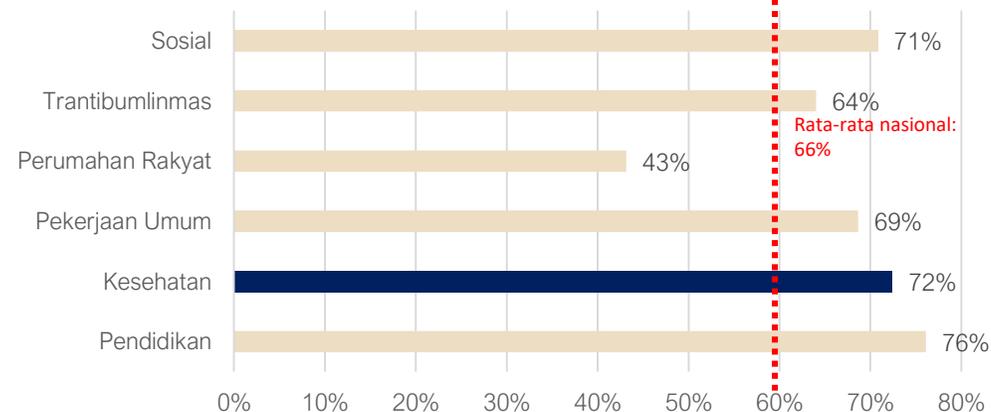
# Rekapitulasi Capaian Penerapan SPM tahun 2020



Rata-rata Capaian Penerapan 6 Bidang SPM tingkat Provinsi



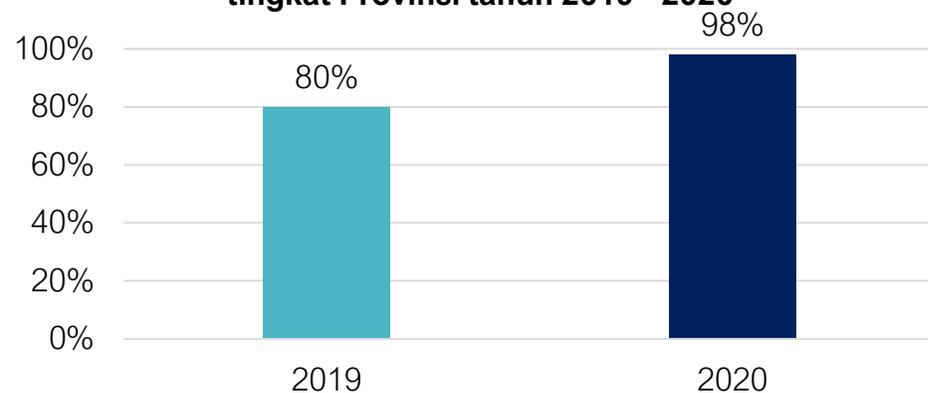
Rata-rata Capaian Penerapan 6 Bidang SPM tingkat Kab/Kota



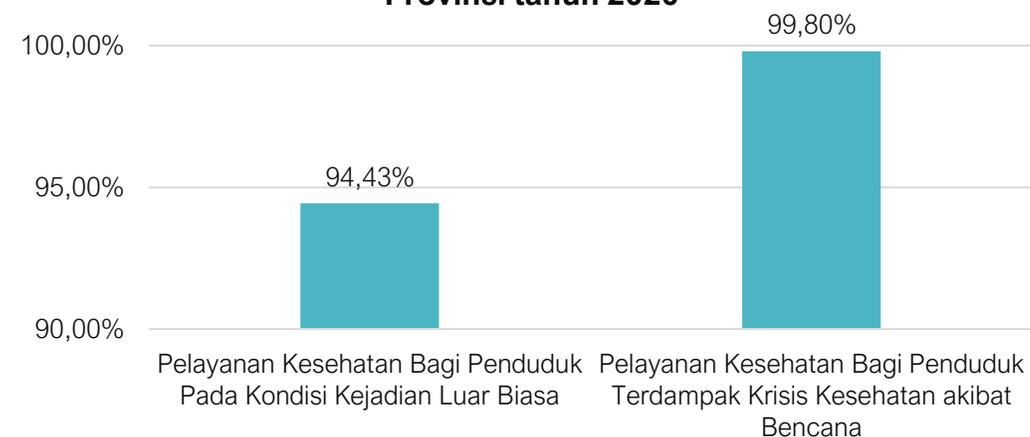
# Rekapitulasi Capaian Penerapan SPM tahun 2020

## Bidang Kesehatan tingkat Provinsi

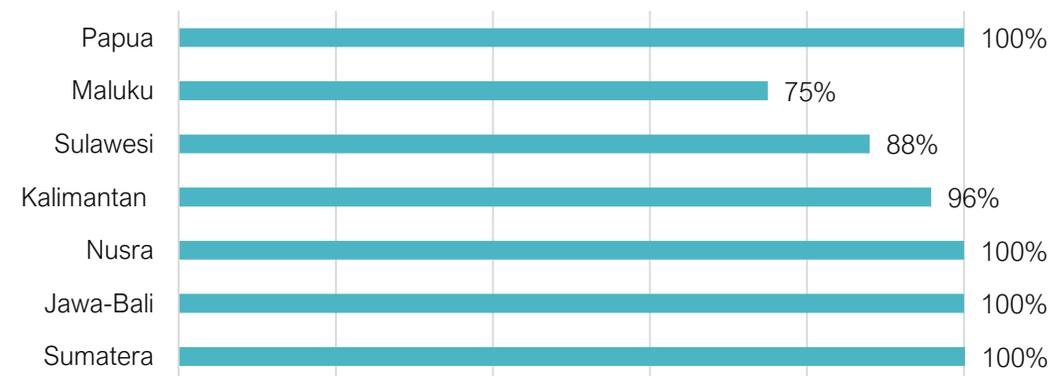
**Capaian Penerapan SPM Bidang Kesehatan tingkat Provinsi tahun 2019 - 2020**



**Capaian Indikator SPM bidang Kesehatan tingkat Provinsi tahun 2020**



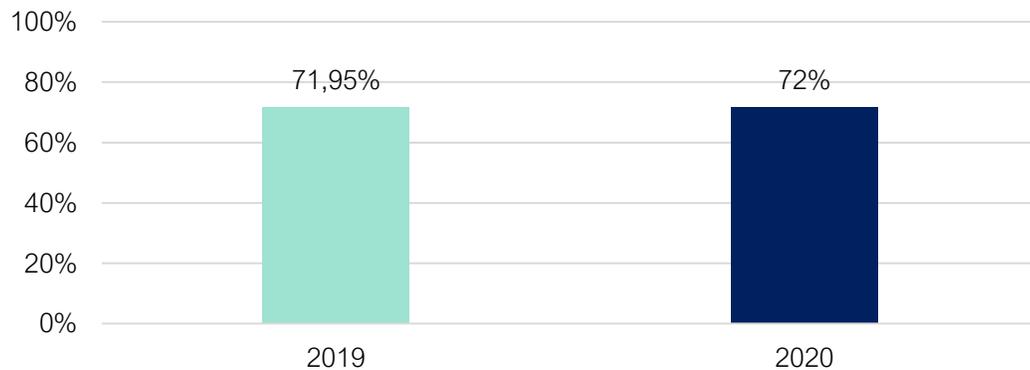
**Capaian SPM Bidang Kesehatan tingkat Provinsi per Lingkup Wilayah tahun 2020**



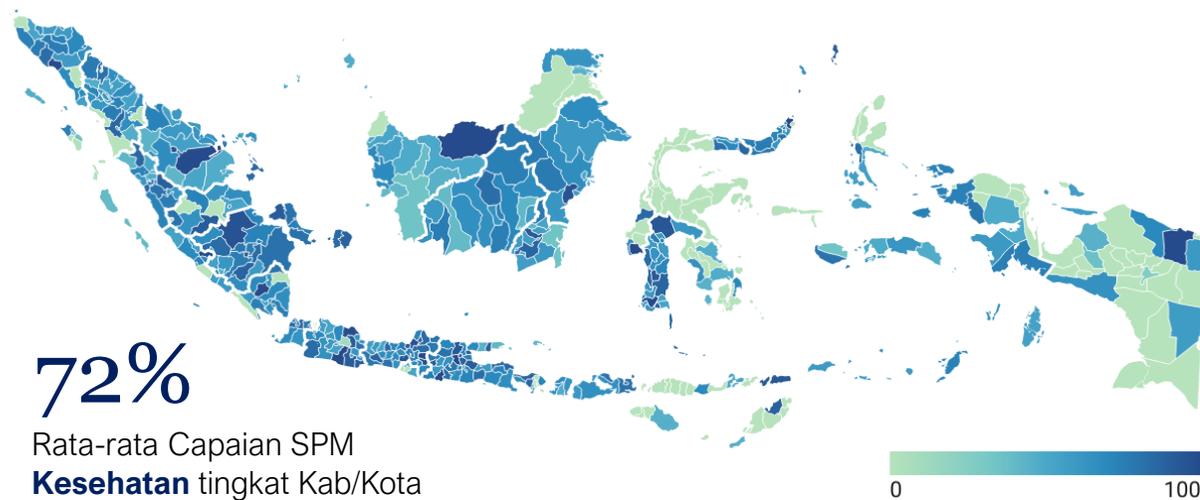
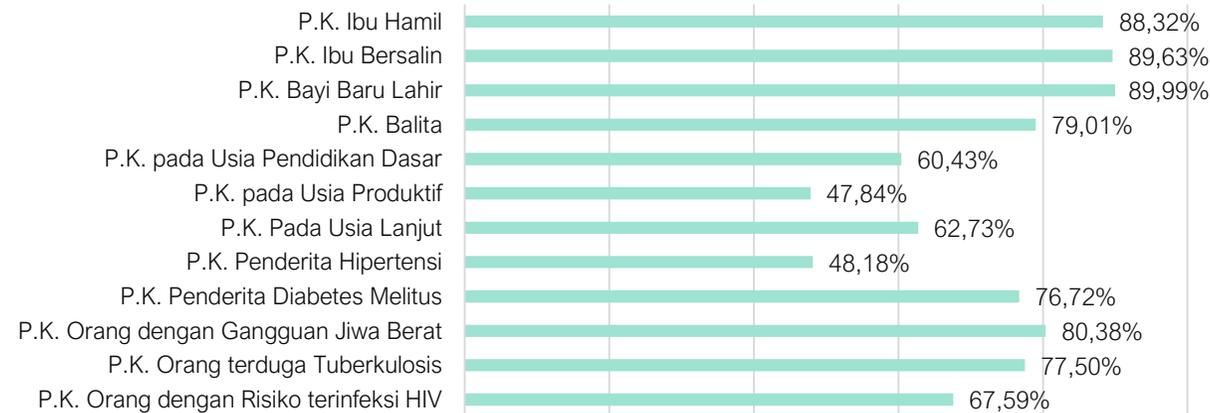
# Rekapitulasi Capaian Penerapan SPM tahun 2020

Bidang Kesehatan tingkat Kabupaten/Kota

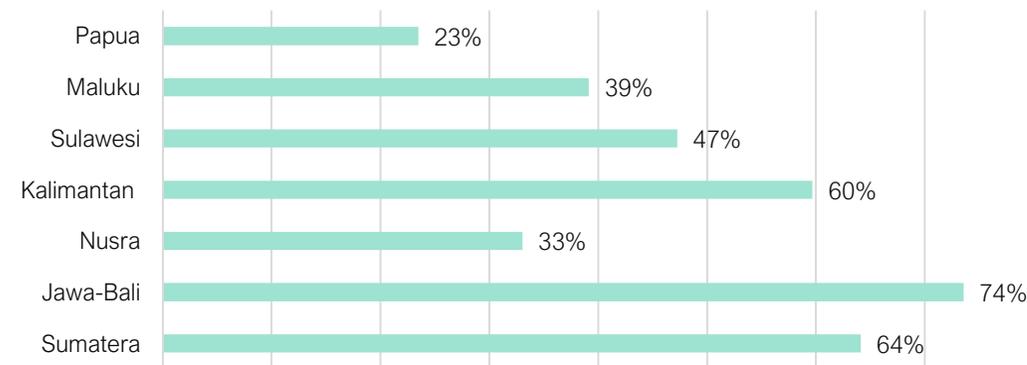
**Capaian Penerapan SPM Bidang Kesehatan tingkat Kab/Kota tahun 2019 - 2020**



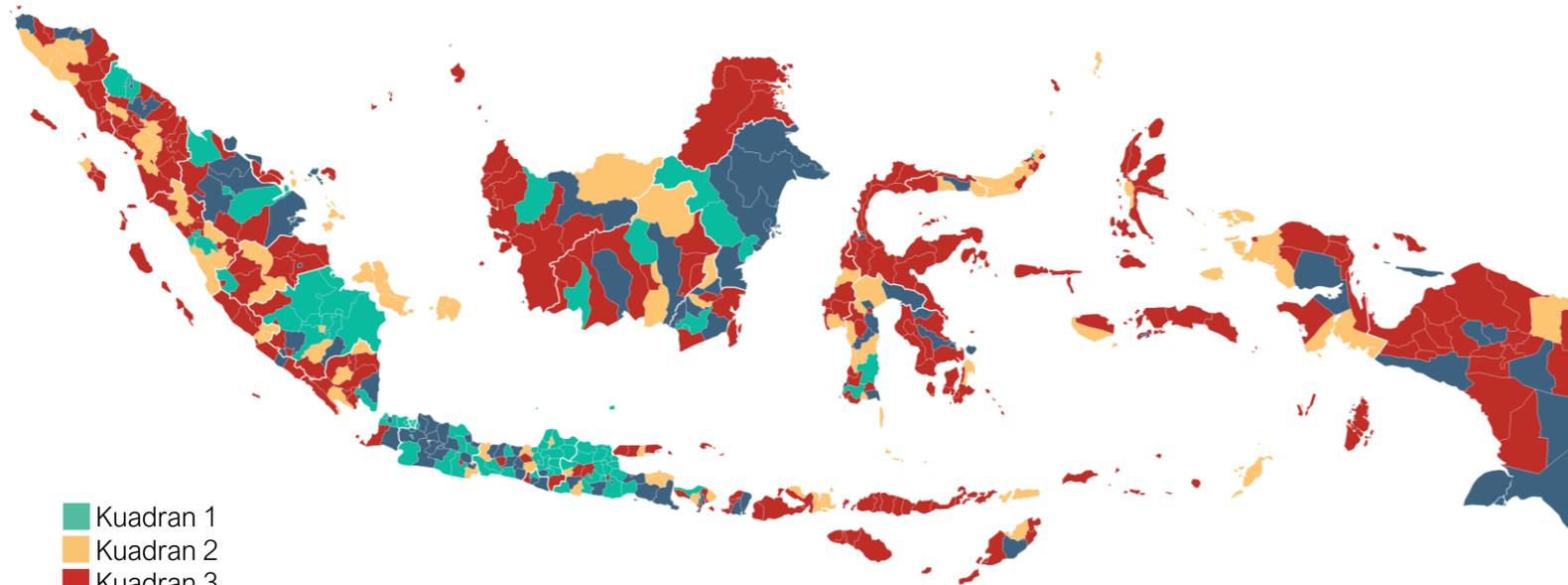
**Capaian Indikator SPM bidang Kesehatan tingkat Kab/Kota tahun 2020**



**Capaian SPM Bidang Kesehatan tingkat Kab/Kota per Lingkup Wilayah tahun 2020**



# Skalogram Capaian SPM Kesehatan vs IKF tahun 2020 Kabupaten/Kota



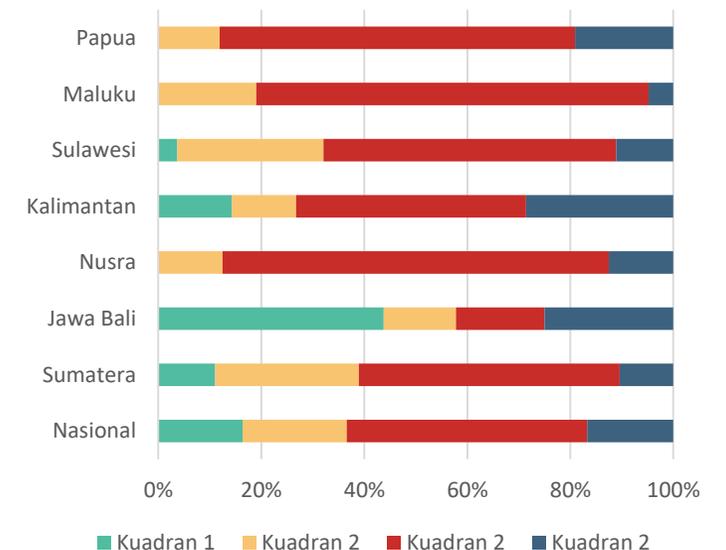
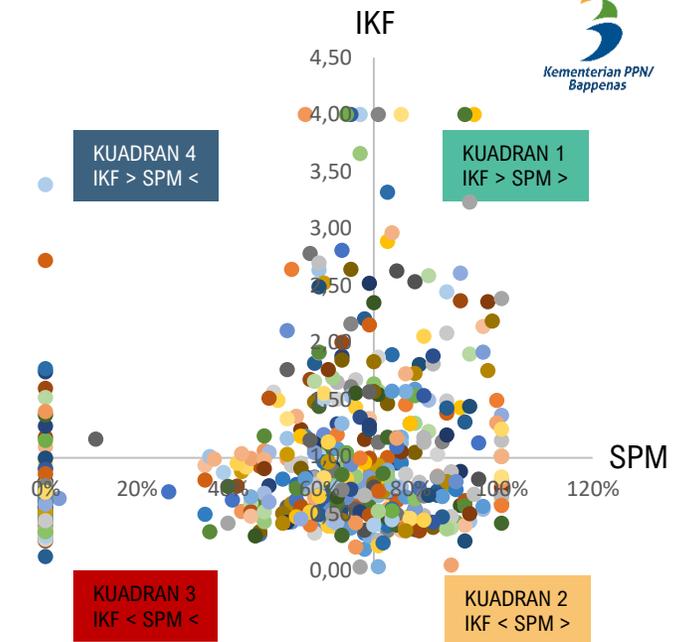
- Kuadran 1
- Kuadran 2
- Kuadran 3
- Kuadran 4

Terdapat 84 daerah di kuadran 1

Terdapat 104 daerah di kuadran 2

Terdapat 240 daerah di kuadran 3

Terdapat 86 daerah di kuadran 4



# Kendala Penerapan SPM Bidang Kesehatan

## Hasil Evaluasi tahun 2020



### Pengumpulan Data

- Pemerintah Daerah **kesulitan menentukan data sasaran** (data masih bersifat proyeksi) serta jenis krisis kesehatan akibat bencana/berpotensi dan jenis bencana dan KLB



### Penghitungan Kebutuhan

- Pemerintah daerah **belum memanfaatkan aplikasi Siscobikes** untuk memperbaiki perencanaan dan penganggaran



### Perencanaan dan Penganggaran

- **Komitmen daerah** belum optimal terutama dari sisi anggaran
- **Koordinasi tim penerapan SPM kab/kota belum optimal**
- **Belum semua indikator SPM kesehatan mendapatkan prioritas** dalam dokumen perencanaan dan penganggaran
- **Refocusing anggaran** untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 menyebabkan kebutuhan operasional kurang dapat dipenuhi



### Pelaksanaan

- **Kurangnya edukasi tentang indikator pengurangan resiko krisis kesehatan akibat bencana** (baik petugas dan penduduk di daerah rawan bencana).
- **Belum bisa dipenuhinya sumber daya** termasuk tenaga kesehatan dan sarana & prasarana medis dan non medis sesuai standar di beberapa Puskesmas.
- **Masyarakat enggan dan khawatir untuk datang ke fasyankes** akibat pandemi Covid-19 sehingga penerapan indikator SPM Bidang Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan tatap muka sulit dilaksanakan
- **Pencatatan dan pelaporan data SPM belum tersistem dengan baik** (terhubung secara online dengan fasyankes) sehingga menyulitkan pemantauan capaian SPM secara *real time*
- Sistem pelaporan yang dikelola oleh Kemenkes **belum terintegrasi** dengan sistem yang dikelola oleh Kemendagri

# Rekomendasi Strategi Percepatan Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Daerah



## Pengumpulan Data

- Mengidentifikasi penerima layanan **by name by address**
- **Berkoordinasi erat dengan pihak terkait** yang memiliki data yang dibutuhkan (puskesmas, kecamatan, BPJS, dll)
- Inventarisasi ketersediaan sumber daya



## Penghitungan Kebutuhan

- Mendorong **pemanfaatan aplikasi Siscobikes** oleh daerah melalui sosialisasi secara rutin



## Penyusunan Rencana

- Memastikan pemenuhan SPM kesehatan sebagai **prioritas perencanaan daerah**
- **Menyusun rencana berbasis tipologi wilayah:** kapasitas daerah (SDM, fiskal, kelembagaan) dan prioritas pembangunan daerah (prioritisasi terhadap SPM)
- Memetakan dan merencanakan kapasitas dan **peran berbagai pihak** baik dari pemerintah maupun nonpemerintah → **Pentahelix Collaboration**
- Mencari **alternatif sumber pembiayaan** dan mengintegrasikannya dengan sumber pembiayaan APBN dan APBD
- Mengintegrasikan rencana SPM bidang kesehatan kedalam **dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran daerah**



## Pelaksanaan

- **Berkomitmen** dalam memberikan layanan dasar sesuai dengan rencana yang telah disusun
- Apabila anggaran terbatas, **penerima layanan difokuskan kepada penerima yang paling prioritas**
- Memanfaatkan **beberapa layanan SPM pada satu kegiatan**, seperti saat vaksinasi Covid-19, posyandu, pertemuan di tingkat desa, dsb
- Menyediakan **sistem transfer knowledge** sebagai solusi mutasi ASN
- **Mendorong efektivitas koordinasi Tim Sekber SPM** di daerah
- Menyusun pelaporan sesuai dengan **realita di lapangan**
- **Mengintegrasikan sistem pelaporan** Kemenkes dan Kemendagri
- Menginisiasi **survei kepuasan masyarakat**
- Melakukan **monitoring dan evaluasi secara berkala**
- Mendorong **pemberlakuan strategi insentif dan disinsentif fiskal**

# Terima Kasih



(021) 390 5643  
ext. 3316



[dit.pd@bappenas.go.id](mailto:dit.pd@bappenas.go.id)



Menara Bappenas Lantai 8  
Jln. HR. Rasuna Said Kav. B-1